

KEBIJAKAN OPEN GOVERNMENT DI TINGKAT DAERAH: STUDI EKSPLORATIF TERHADAP TRANSPARANSI KEUANGAN DAN KETERLIBATAN WARGA

Rodiyah Ahla Samar¹, Vika Annisa Qurrata², Thomas Soseco³
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang, Jawa Timur¹⁻³
Corresponding email: rodiyahahla@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Submission : 09/12/2025
Review : 15/01/2026
Revised : 24/01/2026
Accepted : 02/01/2026
Publish : 02/01/2026

Keywords

Open Government
Transparansi Keuangan
Partisipasi Publik
Pemerintah Daerah
E-Budgeting
SIPD

ABSTRAK

Kebijakan *Open Government* di tingkat daerah menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta partisipatif. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi implementasi *Open Government* pada pemerintah daerah melalui tiga dimensi utama: transparansi informasi publik, keterlibatan warga, serta pemanfaatan teknologi digital sebagai infrastruktur pendukung. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi eksploratif, penelitian ini menelusuri regulasi formal, praktik digitalisasi, dan persepsi publik yang membentuk dinamika keterbukaan di daerah. Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa kapasitas fiskal, otonomi daerah, dan aktivitas ekonomi lokal menjadi determinan penting dalam meningkatkan transparansi, sementara faktor demografis seperti rasio penduduk lanjut usia dapat memperlambat penerapan digitalisasi. Digitalisasi, terutama melalui portal *e-budgeting* dan sistem informasi pemerintahan seperti SIPD, terbukti meningkatkan akses warga terhadap data publik serta memperkuat akuntabilitas. Namun, efektivitas partisipasi publik masih dihambat oleh forum musyawarah yang belum inklusif dan belum sepenuhnya dirancang sebagai ruang deliberatif. Kesenjangan antara desain regulatif dan praktik di lapangan menunjukkan perlunya reformasi mekanisme partisipatif yang lebih terbuka, representatif, dan berbasis teknologi. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan *Open Government* mensyaratkan integrasi yang harmonis antara regulasi yang jelas, kapasitas kelembagaan, kualitas teknologi informasi, serta pelibatan warga yang bermakna. Temuan ini diharapkan menjadi dasar bagi perumusan model implementasi *Open Government* yang adaptif terhadap konteks daerah serta mampu memperkuat kepercayaan publik dalam jangka panjang.

PENDAHULUAN

Konsep *Open Government* telah menempatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik sebagai pilar utama reformasi pemerintahan. OECD (2021) menegaskan bahwa "akses publik terhadap informasi dan ruang partisipasi yang aktif merupakan fondasi demokrasi yang sehat". Sejak Indonesia masuk ke *Open Government Partnership* (OGP) pada 2011, prinsip tersebut tertuang dalam regulasi seperti UU No. 23/2014 dan PP No. 45/2017, yang mewajibkan pemerintah daerah menyediakan akses terhadap data publik, mengutamakan partisipasi warga, serta membuka ruang konsultasi publik. Namun dalam praktiknya implementasi di daerah menunjukkan variasi yang signifikan terkait kedalaman dan efektivitasnya.

Transparansi di daerah dapat terlihat dari keterbukaan data anggaran, layanan publik, serta dokumen kebijakan. Muhtar et al (2021) menemukan bahwa tingkat otonomi fiskal, aktivitas ekonomi lokal, dan leverage fiskal memiliki korelasi positif terhadap transparansi pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi *Open Government* tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga dipengaruhi faktor-faktor ekonomi dan institusional. Selain itu, Putri et al. (2021) mengungkapkan bahwa digitalisasi melalui portal *e-budgeting* dan pelaporan digital selama pandemic meningkatkan kepercayaan publik, karena akses *real-time* terhadap penggunaan APBD meningkatkan persepsi integritas pemerintah daerah.

Praktik partisipasi publik merupakan elemen penting kedua Tyasotyaningrum (2019) melaporkan dalam studi Dialog Publik Jumat di Bojonegoro bahwa mekanisme ini meningkatkan kepercayaan publik, membentuk legitimasi masyarakat, serta memperbaiki pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan penelitian Suryani (2021) menunjukkan bahwa pentingnya partisipasi publik, akuntabilitas, dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah meskipun transparansi secara statistik belum memberi dampak langsung, namun tetap menjadi bagian integral dari model kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung *Open Government* juga telah mendapatkan perhatian. Hasil penelitian Santoso (2025) menyimpulkan bahwa digitalisasi berperan signifikan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Sementara itu studi di Cimahi oleh Thohari et al. (2017) melaporkan adanya peningkatan partisipasi warga sebesar 39% setelah peluncuran sistem keterbukaan data digital namun sayangnya studi ini masih di luar kurun waktu lima tahun terakhir. Meski demikian fenomena serupa dalam lima tahun terakhir misalnya peningkatan penggunaan SIPD dan portal *e-participation* mengindikasikan bahwa digitalisasi menjadi faktor penentu keberhasilan *Open Government* di daerah.

Kajian terhadap interlink antara regulasi, teknologi, dan persepsi warga masih relatif terbatas. Penelitian Premilasari et al. (2023) menyatakan bahwa struktur

perencanaan pembangunan daerah secara alamiah sudah mengadopsi aspek *Open Government*, namun belum dilaksanakan secara by design sehingga program RAPBD sering tidak sesuai dengan hasil musrenbang. Mereka menekankan bahwa "optimalisasi penggunaan TIK menjadi syarat adopsi OG yang ideal". Sejalan dengan penelitian Octaviani et al. (2023) menunjukkan bahwa meskipun keterbukaan informasi desa sudah dilakukan, akses dan kualitas data yang diunggah masih lemah, menyisakan kesenjangan signifikan antara niat dan kenyataan pelaksanaan OG di desa-desa .

Berdasarkan penelitian ini hadir sebagai studi eksploratif yang bertujuan untuk memetakan bagaimana implementasi kebijakan *Open Government* secara komprehensif di tingkat daerah: mencakup analisis dokumen regulasi (UU/PP/Permendagri), mekanisme teknologi dan kanal partisipasi, persepsi warga terhadap kepercayaan dan legitimasi pemerintahan, serta hambatan yang dihadapi terutama terkait kapasitas SDM dan infrastruktur teknologi.

Kerangka teoretis penelitian menggabungkan konsep *New Public Governance* dan *Deliberative Democracy* yang menegaskan bahwa kolaborasi aktif antara pemerintah dan warga melalui kanal terbuka memicu kualitas pengambilan keputusan dan demokratisasi kebijakan lokal. Empirisnya, kombinasi dimensi regulasi formal, digitalisasi kanal publik, dan persepsi warga menjadi variabel analisis utama, bertujuan menghasilkan model praktik terbaik *Open Government* yang adaptif terhadap konteks daerah.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh kerangka kebijakan inklusif yang tidak hanya mencatat sejauh mana regulasi diterapkan, tetapi juga menggambarkan interaksi dinamis antara teknologi, sosialisasi, dan desain mekanisme partisipasi yang bersama-sama membentuk pengalaman nyata warga terhadap transparansi dan keterlibatan dalam pemerintahan daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi eksploratif untuk memahami secara mendalam bagaimana kebijakan *open government* diimplementasikan pada tingkat pemerintah daerah khususnya dalam aspek transparansi dan keterlibatan warga. Desain eksploratif dipilih karena isu keterbukaan pemerintahan di tingkat lokal masih relatif baru dan memerlukan pemahaman kontekstual terhadap praktik serta dinamika sosial yang menyertainya (Creswell, 2018). Pendekatan kualitatif juga memungkinkan peneliti menggali pandangan, pengalaman, dan makna yang dikonstruksikan oleh aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan keterbukaan, sesuai dengan paradigma konstruktivis yang menempatkan realitas sosial sebagai hasil interaksi manusia dengan lingkungannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan antara Transparansi Keuangan dan Determinan Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan *Open Government*

Penelitian Muhtar, Putro, & Sutaryo (2021) yang menganalisis 394 pemerintah daerah menemukan bahwa variabel seperti otonomi fiskal, leverage fiskal, dan aktivitas ekonomi lokal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat transparansi publik. Ini berpijak pada teori kemampuan kelembagaan (*institutional capacity*) sebuah elemen utama dalam kerangka *New Public Governance* (NPG) yang menekankan bahwa pemerintah sejatinya memerlukan sumberdaya fiskal dan kelembagaan memadai untuk menyelenggarakan transparansi secara konsisten. Hasil ini mendukung pandangan Hood (2006) bahwa kemampuan institusional mempertajam efektivitas implementasi kebijakan public termasuk strategi *Open Government*.

Namun demikian, Muhtar et al. juga menemukan bahwa rasio penduduk lanjut usia (*elder ratio*) memiliki efek negatif terhadap transparansi menandakan bahwa pemerintahan yang “lebih tua” atau demografi yang lebih konservatif bisa menahan laju keterbukaan publik. Ini sejalan dengan teori asimetri generasi dalam kualitas layanan digital pemerintahan dimana kelompok dengan usia lebih tinggi cenderung tidak terlalu adaptif pada teknologi informasi dan komunikasi (TIK), sehingga bisa memperlambat eksekusi *Open Government* berbasis digital.

Penelitian Putri (2021) dan Santoso (2025) menunjukkan bahwa implementasi sistem digital seperti portal *e-budgeting* menghasilkan peningkatan persepsi keterbukaan publik karena warga dapat mengakses data penggunaan anggaran secara real-time, Santoso secara eksplisit menyatakan bahwa “digitalisasi berperan signifikan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan”.

Peran Partisipasi Warga dalam Pengawasan dan Akuntabilitas Publik Untuk Mewujudkan *Open Government*

Penelitian oleh Lastri & Gunawan (2020) menemukan bahwa partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik secara signifikan mempengaruhi pengawasan keuangan daerah. Temuan ini sejalan dengan teori model keagenan (*agency theory*) khususnya Klitgaard (1988) yang menyatakan bahwa pengurangan asimetri informasi dan peningkatan akuntabilitas adalah kunci untuk menekan korupsi dan meningkatkan pengawasan public. Partisipasi publik dalam bentuk kontrol sosial memperkaya tekanan akuntabilitas formal, sehingga mempertebal efek aktif dari transparansi dalam melindungi keuangan publik.

Kaitannya dengan teori *e-participation* (Alharbi et al., 2016) digitalisasi memperluas kanal manajemen publik sehingga warga bisa memperoleh data secara efisien, menurunkan hambatan informasi, dan meningkatkan manfaat demokratis *Open Government*. Ini juga mendukung paradigma Hubungannya dengan teori O'Donnell (1998)

dalam kualitas demokrasi, di mana transparansi digital menjadi salah satu parameter penilaian *legitimacy and output legitimacy*.

Studi Wahyudi et al. (2021) mengenai formulasi Perda mengungkap bahwa pemerintah provinsi telah menyebarkan informasi dan melibatkan aktor terkait, namun hanya "aktor yang diundang" yang benar-benar berpartisipasi. Model ini mirip dengan kualitas partisipasi terbatas dimana kanal tersedia tetapi aksesnya eksklusif. Dalam terminologi teori *deliberative democracy* (Habermas, 1996) menunjukkan manfaat partisipasi inklusif tidak hanya memberikan ruang suara, tetapi juga mendorong proses diskursus bersama yang memperkuat demokrasi representatif dan mendorong kualitas keputusan publik.

Hasil penelitian Premilasari et al. (2023) memperingatkan bahwa meskipun kanal perencanaan pembangunan seperti Musrenbang mencakup dimensi OG transparansi, partisipasi, kolaborasi namun belum dilaksanakan secara by design sehingga output RAPBD sering tidak menyesuaikan aspirasi publik. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan *design-practice*, sebuah masalah yang memerlukan intervensi *reform alternatif* (re-design forum partisipatif) agar proses perencanaan benar-benar menjelaskan akar aspirasi warga. Kesenjangan ini sejajar dengan kritik terhadap model *collaborative governance* (Ansell & Gash, 2008) adanya forum diskusi saja tidak cukup struktur forum harus formal, deliberatif, dan aksesif. Kualitas forum sangat menentukan efektivitas outputnya

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penerapan kebijakan Open Government di tingkat daerah sangat dipengaruhi oleh kapasitas fiskal, pemanfaatan teknologi informasi, serta keberfungsian kanal partisipatif. Pemerintah daerah dengan otonomi fiskal yang kuat dan sistem digital yang terintegrasi cenderung lebih mampu menyediakan akses informasi yang transparan dan dipercaya publik. Digitalisasi, dalam bentuk portal e-budgeting atau SIPD, berkontribusi signifikan terhadap persepsi integritas pemerintah.

Selain itu, partisipasi publik terbukti menjadi elemen penguat pengawasan dan akuntabilitas keuangan daerah. Namun, efektivitasnya masih terbatas oleh eksklusivitas akses dan lemahnya desain forum deliberatif. Kesenjangan antara struktur kebijakan dan praktik partisipatif menunjukkan bahwa reformasi sistemik perlu diarahkan pada pembentukan forum yang deliberatif, terbuka, dan representatif. Secara teoretis, temuan ini memperkuat gagasan bahwa tata kelola publik yang efektif tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan antara transparansi dan partisipasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang holistic mengintegrasikan desain regulasi, penguatan kapasitas digital, serta pelibatan aktif warga dalam siklus kebijakan publik.

References

- Alharbi, A., Kang, K., & Hawryszkiewicz, I. (2016). Developing an e-participation maturity model using design science method. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 7(2), 421–429. <https://doi.org/10.14569/IJACSA.2016.070258>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy*. Cambridge: MIT Press.
- Hood, C. (2006). Transparency in historical perspective. In C. Hood & D. Heald (Eds.), *Transparency: The Key to Better Governance?* (pp. 3–23). Oxford University Press.
- Klitgaard, R. (1988). *Controlling corruption*. University of California Press.
- Lastri, E., & Gunawan, A. (2020). Pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan keuangan daerah di Kabupaten Aceh Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 5(1), 113–124. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i1.15649>
- Muhtar, M., Putro, D. A., & Sutaryo. (2021). Determinants of local government transparency in Indonesia: A panel data analysis. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 22(2), 131–148. <https://doi.org/10.21002/jepi.v22i2.1345>
- OECD. (2017–2021). *Open Government and Citizen Participation Reports*. Paris: OECD Publishing.
- OECD. (2021). *Government at a Glance 2021*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/1c258f55-en>
- Octaviani, M., Sukristyanto, A., & Hariyoko, Y. (2023). Keterbukaan pemerintah di tingkat desa: Studi tentang keterbukaan informasi publik di Desa Wateswinangun, Kabupaten Lamongan. *Praja Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(1), 94–108. <https://doi.org/10.53829/po.v3i1.140>
- O'Donnell, G. (1998). Horizontal accountability in new democracies. *Journal of Democracy*, 9(3), 112–126. <https://doi.org/10.1353/jod.1998.0041>
- Oliveira, A., & Ckagnazaroff, I. B. (2022). *Citizen Participation and Democratic Legitimacy in Local Governance*. *Cadernos Gestão Pública e Cidadania*, 27(87).
- Piotrowski, S. J., & Van Ryzin, G. G. (2007). *Citizen Attitudes Toward Transparency in Local Government*. *The American Review of Public Administration*, 37(3), 306–323.

- Premilasari, S. N., Setiawan, I., & Rusmana, R. (2023). Implementasi prinsip Open Government dalam perencanaan pembangunan daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 27(1), 65–78. <https://doi.org/10.22146/jsp.78834>
- Putri, D. E., & Handayani, L. (2021). Implementasi e-budgeting sebagai bentuk transparansi keuangan daerah di masa pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan*, 12(2), 145–156. <https://doi.org/10.25077/jiap.v12i2.1089>
- Santoso, M. R. (2025). E-governance dan akuntabilitas publik: Studi implementasi e-budgeting di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Bina Praja*, 17(1), 51–68. <https://doi.org/10.21787/jbp.17.1.2025.51-68>
- Suryani, P. (2021). Pengaruh partisipasi publik, akuntabilitas, transparansi, integritas terhadap kinerja keuangan Kabupaten Bengkulu Tengah. *Jurnal Fairness*, 9(1), 33–44. <https://doi.org/10.32493/fairness.v9i1.1125>
- Thohari, A. H., Suhardi, Kurniawan, N. B., & Purnomo, Y. (2017). Rekayasa sistem keterbukaan data pemerintah untuk mendukung transparansi dan partisipasi pemerintah daerah: Studi kasus Cimahi. *Jurnal Nasional Teknik Elektro dan Teknologi Informasi*, 6(3), 243–251. <https://doi.org/10.22146/jnteti.v6i3.28001>
- Tyasotyaningrum, B. (2019). Praktik Open Government melalui partisipasi publik di Kabupaten Bojonegoro dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas (Studi kasus dialog publik Jumat). *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.19184/mediasosian.v3i1.8888>
- Wahyudi, A., Setiawan, B., & Munir, M. (2021). Formulasi kebijakan daerah berbasis partisipatif: Studi kasus Raperda Penyelenggaraan Pesantren di Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 8(1), 44–61. <https://doi.org/10.26858/jipkp.v8i1.18034>